

**KEPENTINGAN INDONESIA MENYEPAKATI KERJASAMA EKONOMI  
DENGAN SLOVAKIA DALAM BIDANG  
ENERGI DAN INFRASTRUKTUR**

**By: Agita Suryadi**  
agysuryadi@ymail.com  
Supervisor : **Pazli, S.IP, M.Si**

Library of Riau University

Department of Government  
Faculty of Social Science and Political Science  
University of Riau

Campus Bina Widya J.I H.R Soebrantas Km.12.5 Simp. New Pekanbaru  
Phone fax 0761-63277

***Abstract***

*This research describes the interest of Indonesia to agreed about the economic cooperation with Slovakia in energy and infrastructure. As a development state Indonesia need a increase of energy and infrastructure supply to keep a energ supplied. In order Slovakia are a state in europe and have a potencial resources in energy supply.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze interest of Indonesia to agreed about the economic cooperation with Slovakia in energy and infrastructure. The theories applied in this research are liberalisme perspective, nation state analyze and international ccoperation theory.*

*The research shows that interest of Indonesia to agreed about the economic cooperation with Slovakia in energy and infrastructure are to increase a income of Indonesia from energy and infrastructure capital. This agreement have done in 2009 until 2012, with the built of volt resources in some place in Indonesia like Batam Island and built semen company.*

***Key words:*** *cooperation, interest, energy, infrastructure.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai kepentingan Indonesia menyepakati kerjasama dengan Slovakia dibidang energi dan infrastruktur. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada alasan dan tujuan Indonesia menyepakati kerjasama dengan Slovakia dibidang energi dan infrastruktur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Slovakia terkait kerjasama kedua negara dibidang ekonomi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai kepentingan Indonesia

menyepakati kerjasama dengan Slovakia dibidang energi dan infrastruktur.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk

memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2009-2012 pada masa kerjasama Indonesia dan Slovakia dibidang ekonomi. Tahun 2009 dipilih karena pada saat itu Pemerintah Indonesia mulai menyepakati kerjasama dengan Slovakia dibidang energi dan infrastruktur. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena di setiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.<sup>1</sup>

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan

---

<sup>1</sup> Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu. Hal 225

perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa:

*“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home ini treasure.”*<sup>2</sup>

Penelitian ini memfokuskan kepada peran dan kebijakan negara Indonesia dan Slovakia dalam pengambilan kebijakan. Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara bangsa.

---

<sup>2</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

Tingkat analisa ini, penelaahannya difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan interasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Di tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.<sup>3</sup>

Kemudian dalam penelitian juga dibutuhkan teori untuk menganalisis suatu kasus. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.<sup>4</sup> Dalam penelitian juga dibutuhkan pemaparan jelas tentang konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 41

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 219.

teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori kerjasama internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan

perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

---

<sup>5</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan

manusia dalam masyarakat internasional.”<sup>6</sup>

Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki

---

<sup>6</sup> Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung*, 1977, hal. 19

makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.<sup>7</sup> Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk

mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan

---

<sup>7</sup>Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo, hal. 18

tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama.<sup>8</sup>

Pendapat Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka

interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.<sup>9</sup>

Kerjasama internasional dapat terwujud atas dasar kepentingan yang sama dan bekerja atas prinsip saling

---

<sup>8</sup>*Op.cit.* Holsti, hal. 209

---

<sup>9</sup>T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, hlm.27



menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional perlu bagi setiap negara. Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat dalam negeri. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan antar negara<sup>10</sup>.

Dalam melakukan kerjasama internasional, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa

adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula.

2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen<sup>11</sup>.

Menurut J. Frankle, kerjasama merupakan identifikasi dari sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, dengan kata lain kerjasama merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari sasaran bersama dengan menggunakan metode

---

<sup>10</sup> Syamsur Dam, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 15

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 16

tertentu untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut<sup>12</sup>.

Dalam masa yang akan datang negara-negara akan bergantung pada kerjasama internasional yang sifatnya fungsional, yaitu kerjasama yang mencakup kehidupan internasional yang sangat luas dan untuk dapat memenuhi kebutuhan banyak umat manusia sampai yang terkecil. Kerjasama internasional merupakan hubungan antara dua atau lebih negara, perusahaan, lembaga yang melewati batas-batas negara<sup>13</sup>.

Investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Dalam konteks di atas, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) diartikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> J. Frankle, *Hubungan Internasional*, Jakarta, Singgih Bersaudara, 1980, hal 102 dalam Library UPNVJ, *Motivasi Singapura melakukan kerjasama Ekonomi Dengan Pemanfaatan Free Trade Area di Pulau Batam*, terdapat di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf> diakses pada 18 Februari 2013

<sup>13</sup> *Ibid.*

*“Foreign direct investment is contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment are those investment in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.”<sup>14</sup>*

Pengertian penanaman modal langsung diatas pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan. Sornarajah merumuskan investasi asing langsung sebagai berikut:

*“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of use in that country to generate. Wealth under the total or partial*

---

<sup>14</sup> Pasal 1 *Cartagena Agreement* sebagaimana dikutip oleh T.Mulya Lubis, dalam buku *Hukum dan ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 31.

*control of the owner of the asset.*"<sup>15</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan Sornarajah diatas, maka investasi asing langsung mensyaratkan adanya transfer modal baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dan tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.

Sesuai teori yang digunakan adalah kerjasama internasional dan investasi langsung maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", Konsep kepentingan Nasional (*Interest*) yang didefinisikan dalam istilah "*power*" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau

"reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrument penting untuk mencapai kepentingan nasional.

Interest atau Kepentingan adalah setiap politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara.

Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan

---

<sup>15</sup> Dalam Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internationa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak dan yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik Internasional.<sup>16</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Slovakia merupakan sebuah negara di Eropa Timur dengan luas wilayah 49.035 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk kurang lebih 5.477.038 jiwa (Juli 2011), yang sebelumnya tergabung dalam Federasi Cekoslovakia. Negara Slovakia berbentuk Republik Slovakia, sistem Demokrasi Parleментар dengan Presiden sebagai Kepala negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala

Pemerintahan serta ibukota negara di Bratislava.<sup>17</sup>

Hubungan persahabatan bilateral Indonesia dengan Slovakia dimulai dengan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Republik Slovakia pada tanggal 31 Desember 1992 melalui pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Republik Slovakia, setelah secara resmi dan damai berpisah dari Federasi Cekoslovakia. Selanjutnya hubungan persahabatan kedua negara berkembang dengan pembukaan perwakilan diplomatik Republik Slovakia di Jakarta dan pembukaan Kedutaan Besar RI di Bratislava pada tahun 1995.

Peningkatan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Republik Slovakia terus digali dan ditingkatkan oleh kedua negara. Intensitas saling kunjung antara pejabat kedua negara menunjukkan kebutuhan kedua negara untuk meningkatkan hubungan

---

<sup>16</sup>Hans J. Morgenthau, 1951, *In Defense of the National Interest* A. Knopf. New York

---

<sup>17</sup> Mas'ead Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional*, (PT: Pusaka Jakarta, 2005) hlm.56

persahabatan dan kerjasama bilateral. Selain itu juga saling dukung dalam kegiatan internasional termasuk dalam kegiatan PBB membuktikan bahwa kedua negara memiliki tingkat hubungan bilateral yang sangat baik, saling pengertian dan saling membutuhkan di antara kedua negara. Berbagai persamaan pandangan antara kedua negara dapat memberikan makna yang sangat besar bagi kekuatan ikatan persahabatan dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan.<sup>18</sup>

Dalam hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara telah menunjukkan peningkatan yang positif. Nilai volume perdagangan kedua negara mencapai US\$ 84,5 juta atau meningkat 15,12 % pada tahun 2010. Meskipun belum signifikan, kedua negara telah menunjukkan bukti bahwa hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi

kedua negara berkembang secara konstruktif.<sup>19</sup>

Forum Komunikasi II Indonesia dan Slovakia telah berlangsung di Bali pada bulan Maret 2007, sedangkan FKB III diselenggarakan di Bratislava pada bulan Februari 2008. Sementara pada tahun 2010, diselenggarakan Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri yang menggantikan FKB tahun 2010. Forum ini merupakan wadah bertukar pikiran tentang berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua negara.

Selain itu, mulai tanggal 31 Juli 2010, antara Slovakia dengan Indonesia sudah diberlakukan dan terjalin kesepakatan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas kedua negara yang sekaligus merupakan negara anggota Uni Eropa urutan kelima dari anggota Schengen setelah Belgia, Belanda, Luxemburg, dan Austria yang telah memiliki perjanjian serupa dengan Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.47

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.64

<sup>20</sup> *Loc.cit*, Selayang Pandang hal. 19-20.

Adapun bentuk Kerjasama antara Indonesia dengan Slovakia antara lain sebagai berikut:

1. MoU pasokan listrik untuk Kawasan Industri Kabil antara PT Pembangunan Kota Batam, PT Tria Talang Emas dan PT Kabil Citranusa.
2. Perjanjian finansial (financial agreement) untuk pembiayaan dan pembangunan pembangkit listrik 2x60 MW di Kabil antara istro Energo Group of Slovakia EPC Contractro, Exim Bank of Slovakia dan PT Tria Talang Emas.
3. MoU pembangunan pembangkit listrik minimum 600 MW antara BP Batam, PT Pembangunan Kota Batam, PT Tria Talang Emas, Saratoga Group dan Pemerintah Kota Batam.
4. MoU pasokan listrik minimum 600 MW termasuk jaringan transmisi kabel bawah laut ke Singapura antara PT Tria

Talang Emas dan YTL Power Seraya Pte. Limited of Singapore.

5. MoU kontruksi pabrik semen di Kalimantan Timur antara Lippo Group, Keramoprojekt dan FINAPRA Financial Group,
6. Perjanjian pembentukan Konsorsium antara Energo Group Slovakia dan PT Imeco Inter Sarana untuk lelang tender pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 200 MW di Arun.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah kepentingan Indonesia menyepakati kerjasama energi dan infrastruktur dengan Slovakia adalah untuk meningkatkan devisa negara melalui tambahan modal guna mencapai target dalam bidang energi dan infrastruktur. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki nilai yang sangat

strategis terhadap kepentingan nasional Slovakia.

Posisi geografi Indonesia yang strategis dengan Slovakia menjadi salah satu alasan utama bagi Slovakia agar menjaga kedekatan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Dari bidang ekonomi, Indonesia menjadi partner ekonomi yang menguntungkan bagi Slovakia. Potensi migas yang besar yang dimiliki Indonesia menjadi peluang ekonomi bagi Slovakia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo.

Hans J. Morgenthau, 1951, *In Defense of the National Interest*. A. Knopf. New York

Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internationa*,

PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

J. Frankle, 1980. *Hubungan Internasional*, Jakarta, Singgih Bersaudara.

K.J Holsti 1988, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988.

Koesnadi Kartasasmita, 1977. *Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi* Bandung.

Mas'ead Mohtar, 2005. *Ilmu Hubungan Internasional*. PT: Pusaka Jakarta.

Syamsur Dam, 1996. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama.

### Website

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf>  
diakses pada 18 Februari 2013